



Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular di Kepulauan Selayar

Rizal Sultan Madani^{1*}, A. Muhammad Agumpratama W², Mersi Irwan³

^{1,2}PT PLN Indonesia Power UBP Tello UP PLTD Selayar, Indonesia,

^{1,2}Jln Poros Lembang Matene, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

*E-mail: rizal.madani@gmail.com

Received: 28 January 2026; Revised: 12 February 2026; Accepted: 02 March 2026

Abstrak

Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini telah mencapai titik krusial, yang ditandai dengan fenomena kelebihan kapasitas pada TPA Kaburu sebagai pusat pembuangan utama. Kondisi ini merefleksikan bahwa sistem pengelolaan sampah konvensional tidak lagi memadai, sehingga dibutuhkan transisi menuju pendekatan yang lebih baik. Upaya strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi multipihak, salah satunya melalui Program CSR Peduli Lingkungan Tanadoang oleh PT PLN IP UP PLTD Selayar. Program tersebut berfokus pada pengolahan limbah organik. Efektivitas dan keberlanjutan program ini sangat ditentukan oleh optimalisasi modal sosial di tengah masyarakat. Intervensi program telah berhasil menggeser paradigma warga dari sekadar membuang sampah menjadi praktik pengelolaan ekonomi sirkuler secara komunal. Elemen modal sosial, yang terdiri kepercayaan, norma sosial, altruisme, dan jaringan sosial merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan program. Sinergi antara aspek ekonomi dan sosial ini menjadi faktor determinan dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata Kunci: modal sosial, ekonomi sirkuler, pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan

Social Capital in Circular Economy-Based Community Empowerment in the Selayar Islands

Abstract

The waste management issue in Kepulauan Selayar Regency has reached a critical juncture, marked by the overcapacity of the Kaburu Landfill as the primary disposal site. This condition highlights the inadequacy of conventional waste management systems, underscoring the urgent need to transition toward a more sustainable approach. This strategic effort is realized through multi-stakeholder collaboration, notably through the "Tanadoang Environmental Care" CSR Program initiated by PT PLN IP UP PLTD Selayar, which focuses on organic waste processing. The effectiveness and long-term sustainability of the program are heavily reliant on optimizing social capital within the community. Program interventions have successfully shifted the residents' paradigm from mere waste disposal toward communal circular economy practices. Elements of social capital—comprising trust, social norms, altruism, and social networks—serve as key determinants of program continuity. Ultimately, the synergy between these social and economic dimensions acts as a decisive factor in ensuring sustainable community-based waste management in Kepulauan Selayar Regency.

Keywords: social capital, circular economy, community empowerment, corporate social responsibility

How to Cite: Madani, R.S., dkk. (2026). Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular di Kepulauan Selayar. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 10(1). 52-67. doi: <https://doi.org/10.21831/diklus.v10i1.101206>



PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah berkembang menjadi isu lingkungan yang semakin kompleks dan multidimensi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya aktivitas pemanfaatan ekosistem serta percepatan perpindahan penduduk ke berbagai wilayah. Selain itu, perubahan fundamental pada pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat dan tidak berkelanjutan turut mendorong bertambahnya volume dan ragam sampah. Di sisi lain, sistem penanganan sampah yang belum tepat dan terpadu menyebabkan akumulasi sampah sulit dikendalikan secara efektif. Kebiasaan masyarakat yang belum ramah lingkungan serta lemahnya penegakan regulasi persampahan semakin memperumit upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan (Awino & Apitz, 2025).

Peningkatan volume timbulan sampah yang terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan kapasitas sistem pengelolaan yang memadai telah berdampak signifikan pada penurunan kualitas lingkungan secara drastis. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan masyarakat semakin meningkat, seperti penyakit pernapasan, kasus asma bronkitis, diare bahkan meningkatnya risiko penyakit kanker (Eshete et al., 2024). Sementara itu, beban operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin berat hingga melampaui daya tampungnya, yang secara tidak langsung turut berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Fenomena ini menunjukkan indikasi bahwa pengelolaan sampah tidak dapat lagi dipandang secara sederhana sebagai persoalan teknis operasional semata, melainkan merupakan tantangan sistemik yang mendesak. Persoalan ini mencakup dimensi yang sangat luas, meliputi aspek keberlanjutan lingkungan, dinamika sosial kemasyarakatan, serta efisiensi ekonomi wilayah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma pengelolaan yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya krisis ekologis yang lebih parah di masa mendatang.

Di berbagai wilayah di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang sangat bergantung pada paradigma kumpul, angkut, dan buang. Pendekatan manajemen pengelolaan sampah seperti ini terbukti belum menempatkan upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber sebagai prioritas utama dalam hierarki pengelolaan limbah (Nurhadi dkk., 2023). Konsekuensi logis dari model ini adalah volume sampah yang masuk ke TPA terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, padahal kapasitas lahan dan teknologi pengolahan yang tersedia sangatlah terbatas. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap metode *landfilling* ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan lanjutan yang serius dan bersifat jangka panjang. Dampak negatif tersebut meliputi pencemaran tanah oleh lindi, kontaminasi sumber air tanah, serta pelepasan emisi gas rumah kaca ke udara yang memperparah pemanasan global. Dengan demikian, mempertahankan sistem pengelolaan konvensional bukanlah pilihan yang bijak bagi keberlanjutan ekosistem.

Dinamika pengelolaan sampah di Indonesia merepresentasikan kompleksitas persoalan lingkungan yang berkaitan erat dengan dimensi sosial dan ekonomi. Pada skala nasional, permasalahan ini dipengaruhi secara signifikan oleh faktor demografis berupa pertumbuhan penduduk, serta faktor ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas konsumsi tersebut berimplikasi langsung terhadap bertambahnya volume dan ragam timbulan sampah. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya penerapan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara sosiologis, situasi ini mencerminkan masih lemahnya dorongan perubahan perilaku di tingkat komunitas serta belum optimalnya peran strategis para pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Tanpa adanya

intervensi sosial yang terencana dan penguatan kolaborasi lintas sektor, permasalahan sampah berpotensi terus menjadi beban pembangunan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan krusial tersebut juga teridentifikasi secara nyata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Keterbatasan infrastruktur logistik dan akses pelayanan publik yang belum merata menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem manajemen persampahan yang ideal di wilayah kepulauan ini. Praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping masih sering ditemukan di berbagai titik, yang menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang berlaku. TPA Kaburu yang merupakan satu-satunya fasilitas pemrosesan akhir yang menjadi tumpuan di wilayah ini, diproyeksikan akan mengalami tekanan daya tampung yang semakin besar dan mengkhawatirkan. Seiring dengan tren peningkatan timbulan sampah yang terus terjadi dari tahun ke tahun, TPA ini berpotensi besar untuk melebihi kapasitas desainnya dalam waktu singkat jika tidak ada upaya mitigasi yang konkret.

Berdasarkan analisis data sekunder Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diakses pada Desember 2025, timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan perlu diwaspadai. Pada tahun 2021, total timbulan sampah tercatat mencapai angka 56,13 ton per hari atau setara dengan 20.488,47 ton. Angka ini sempat mengalami fluktuasi menjadi 55,19 ton per hari atau 20.144,20 ton per tahun pada tahun 2022, namun kembali melonjak menjadi 56,35 ton per hari atau 20.568,63 ton per tahun pada tahun 2023. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana timbulan sampah mencapai 56,84 ton per hari atau setara dengan 20.746,60 ton per tahun. Berdasarkan

berbagai kondisi *eksisting* dan juga pengamatan observasi di lokasi ini, mayoritas tumpukan sampah didominasi oleh sampah organik dari rumah tangga. Data statistik ini bukan sekadar angka, melainkan suatu hal penting yang mengindikasikan perlunya intervensi pengelolaan sampah yang jauh lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencegah krisis sampah di masa depan.

Sistem pengelolaan sampah konvensional yang bersifat linier dengan pola yang ada saat ini yang hanya diangkut dan dibuang begitu saja telah terbukti secara empiris tidak berkelanjutan karena secara sistematis mengabaikan potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam material sisa. Pendekatan yang telah ada dan banyak dilakukan ini secara langsung menyebabkan peningkatan timbulan residu yang tidak memanfaatkan, mempercepat laju penumpukan sampah di TPA, serta berkontribusi besar terhadap degradasi lingkungan (Li et al., 2024). Selain itu, model ini juga memboroskan sumber daya alam karena material yang sebenarnya masih bisa didaur ulang justru berakhir menjadi limbah yang membebani lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pengelolaan sampah yang fundamental, beralih dari sekadar manajemen pembuangan menuju manajemen sumber daya. Transformasi ini menuntut orientasi baru yang tidak hanya fokus pada bagaimana membuang sampah, tetapi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan kembali sumber daya yang ada di dalamnya sehingga sampah yang selama ini dipandang tidak memiliki nilai dapat bisa menjadi memiliki nilai.

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem linier, konsep ekonomi sirkuler hadir sebagai alternatif solusi yang menekankan pada prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang material. Filosofi utama dari ekonomi sirkuler adalah menjaga agar material tetap berada dalam siklus pemanfaatan selama mungkin, sehingga dapat meminimalkan *input* sumber daya baru dan *output* limbah. Dalam konteks spesifik pengelolaan sampah domestik,

ekonomi sirkuler mendorong praktik pemilahan sampah yang disiplin sejak dari sumbernya, pengolahan terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta pengembangan kegiatan atau program berbasis daur ulang (Omokaro et al., 2026). Penerapan konsep ini tentu tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan multipihak (multi-stakeholder) yang saling bersinergi. Namun, keberhasilan ekonomi sirkular tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan teknologi, melainkan oleh kemampuan masyarakat untuk mengubah praktik pengelolaan sampah menjadi kebiasaan kolektif yang konsisten. Karena itu, sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi penting untuk membangun kapasitas, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan tingginya biaya pengelolaan serta mobilisasi material, modal sosial menjadi faktor strategis karena dapat memperkuat kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat. Perspektif ini menempatkan CSR bukan sekadar sebagai instrumen penyediaan sarana atau pendanaan, tetapi sebagai katalisator yang mengubah modal sosial menjadi kapasitas kolektif untuk menjaga keberlanjutan praktik ekonomi sirkular. Dengan demikian, keberlanjutan program CSR berbasis ekonomi sirkular sangat ditentukan oleh sejauh mana intervensi mampu memperkuat partisipasi dan kelembagaan lokal sehingga pengelolaan sampah tetap berjalan secara mandiri setelah dukungan eksternal berkurang.

Meskipun konsep sistem telah tersedia, masyarakat tetap memegang peran yang paling strategis dalam rantai pengelolaan sampah, khususnya pada tahap krusial yaitu pemilahan dan pengolahan awal di tingkat rumah tangga. Keberhasilan sistem makro sangat bergantung pada kedisiplinan mikro di level individu dan keluarga dalam memperlakukan sampah yang mereka hasilkan sehari-hari. Namun,

realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan teknis masyarakat menjadi kendala utama yang menghambat penerapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks kesenjangan kapasitas inilah, program CSR dari sektor swasta dapat mengambil peran penting. CSR berfungsi sebagai katalisator yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai intervensi, mulai dari kegiatan edukasi intensif, pelatihan keterampilan teknis, penyediaan sarana prasarana yang memadai, hingga pendampingan berkelanjutan (Hombore, 2025; Sabolak & Zebua, 2024).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui program Peduli Lingkungan Tanadaoang (PELITA) di Kabupaten Kepulauan Selayar, PT PLN IP UBP Tello UP PLTD Selayar menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis pembangunan berkelanjutan. Intervensi ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan ekonomi sirkuler guna mendorong kemandirian finansial warga. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diwujudkan melalui pelatihan teknis, penyediaan infrastruktur, serta pendampingan program. Kolaborasi ini melahirkan berbagai model pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah, TPS3R, pengomposan komunal, dan kerajinan daur ulang. Integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan tersebut terbukti efektif menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dalam intervensi pengelolaan sampah ini didasari oleh kepercayaan sosial, norma sosial, dan jaringan sosial sehingga memiliki tingkat efektif yang baik jika diimplementasikan (Xu et al., 2024; Bonan, 2025).

Argentiero et al., (2023) mengemukakan bahwa modal sosial dan kerja sama antarindividu menghasilkan hubungan sosial yang berkualitas tinggi,

yang berdampak positif terhadap perilaku pro-lingkungan, khususnya dalam aktivitas daur ulang sampah. Kendati berbagai inisiatif telah dijalankan, keberlanjutan program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan kultural yang tidak ringan. Chain et al., (2024) turut mengungkapkan bahwa hambatan yang sering muncul antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik karena kendala biaya pengolahan maupun kualitas produk yang tidak konsisten, keterbatasan kapasitas manajerial kelembagaan kelompok pengelola, serta belum optimalnya integrasi prinsip bisnis dalam program CSR. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya evaluasi dan kajian mendalam untuk menemukan formula perbaikan yang tepat agar program tidak berhenti di tengah jalan. Sebagaimana diungkap oleh Isaacs et al., (2026) bahwa salah satu adanya hambatan program pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan norma yang kurang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui CSR serta dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 13 tentang perubahan iklim dan poin 12 tentang konsumsi dan pola produksi yang bertanggung jawab yang menjadi tantangan global saat ini.

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan dalam pengelolaan sistem ekonomi yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Dalam model ini, produk dan material dirancang untuk digunakan kembali, diperbaiki, atau didaur ulang sehingga pembentukan limbah dapat diminimalkan secara optimal. Tujuannya adalah mengurangi pencemaran, menghemat sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sistem ini berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu: pengurangan limbah dan pencemaran melalui perancangan yang baik, menjaga agar produk

dan material tetap digunakan selama mungkin, serta memulihkan dan meregenerasi sistem alam (Geissdoerfer et al., 2017). Berbagai praktik pengelolaan limbah dengan pendekatan ekonomi sirkular telah diterapkan di berbagai daerah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan. Pendekatan ini turut diterapkan pada pengelolaan sampah organik melalui pengolahan dan pemanfaatan kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna melalui beberapa opsi proses seperti pengomposan, biodigester, dan pemanfaatan kembali residu organik menjadi produk bernilai tambah. Penelitian yang dilakukan oleh Anokye (2025) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah dengan menggunakan *Black Soldier Fly Larvae* (BSFL) terbukti mampu mengolah limbah organik menjadi pakan dan pupuk bernilai tinggi, menekan biaya produksi, serta mengurangi tekanan terhadap ekosistem alam. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini memerlukan dukungan kebijakan, investasi awal, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan.

Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular juga memberikan kontribusi pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Penelitian yang dilakukan Pakravan, (2026) menunjukkan bahwa penerapan strategi ekonomi sirkular di sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga perdesaan. Tingginya tingkat kerawanan pangan menegaskan perlunya praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang efisien, adaptasi tanaman dan ternak, serta perbaikan infrastruktur dan pemanfaatan pengetahuan. Strategi ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan perekonomian lokal. Oleh karena itu, dukungan kebijakan melalui pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan agar

ekonomi sirkular pertanian dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Konsep modal sosial merupakan konstruksi yang memiliki cakupan luas dan kompleks. Berbagai pemaknaan terhadap modal sosial dipengaruhi oleh perspektif serta dimensi analisis yang digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan konsep tersebut. Secara umum modal sosial merujuk pada hubungan sosial, jaringan interaksi, serta tingkat kepercayaan dan kerja sama antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Modal sosial dipandang sebagai unsur pemersatu dalam komunitas yang berperan dalam menurunkan biaya transaksi sosial, meningkatkan koordinasi, serta memperbaiki efisiensi dalam aktivitas bersama. Terdapat tiga tokoh utama yang meletakkan dasar teori modal sosial, yaitu Robert Putnam, Coleman, dan Pierre Bourdieu. Putnam (1993) memaknai modal sosial sebagai atribut yang melekat dalam organisasi sosial, meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma yang berfungsi meningkatkan efisiensi masyarakat melalui terbentuknya tindakan kolektif yang terkoordinasi. Lebih lanjut, Putnam menegaskan bahwa keterlibatan individu dalam kehidupan sosial berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas institusi publik serta kualitas layanan yang dihasilkan (Santoso, 2020).

Coleman (1990) dalam Ninh & Tam, (2026) menyatakan bahwa modal sosial terletak pada struktur hubungan antarindividu, dengan elemen seperti kepercayaan, kewajiban timbal balik, dan norma sosial berfungsi memfasilitasi tindakan kolektif. Masing-masing memiliki pendekatan yang saling melengkapi dalam pemahaman terhadap konsep ini. Lebih lanjut Bourdieu (1986) menyatakan bahwa modal sosial adalah akumulasi sumber daya potensial maupun aktual yang dimiliki individu melalui kepemilikan jaringan sosial yang berkelanjutan. Bourdieu (1986) menekankan aspek kekuasaan dan manfaat dalam relasi sosial, serta memandangnya sebagai sumber daya untuk mencapai posisi sosial tertentu.

Berdasarkan beberapa uraian studi terdahulu masih menempatkan pengelolaan sampah dalam kerangka operasional atau pendekatan ekonomi sirkular secara umum, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam integrasi antara modal sosial, pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, dan implementasi ekonomi sirkular dalam konteks wilayah kepulauan. Selain itu, kajian empiris yang menelaah efektivitas program CSR perusahaan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan juga masih terbatas, khususnya pada daerah dengan keterbatasan infrastruktur seperti wilayah kepulauan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian mengenai peran strategis modal sosial sebagai faktor kunci yang menjembatani keberhasilan implementasi ekonomi sirkular melalui intervensi CSR di tingkat lokal. Rumusan masalah penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana peran modal sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program CSR pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan program dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rumusan masalah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang adaptif, resilien, dan berorientasi pada ekonomi sirkular.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena yang kompleks, dinamis, dan memiliki makna sosial sesuai dengan pendapat Sugiyono (2020). Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi, proses, dan interaksi yang terjadi selama pelaksanaan program secara komprehensif.

Penelitian menerapkan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui program CSR PT PLN Indonesia Power UBP Tello UP PLTD Selayar. Fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah rumah tangga. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pelaksanaan program serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pelaksanaan program serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program, yang mencakup 15 informan dari unsur pengelola program, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Ketiga kelompok informan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang beragam mengenai pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, manfaat, serta perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan, arsip program, dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi serta meningkatkan keabsahan temuan penelitian. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan pada Desember tahun 2025 hingga Mei tahun 2026.

Analisis data dilakukan secara sistematis yang terdiri dari proses pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema penelitian. Data yang relevan kemudian dikategorikan

ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, manfaat program, perubahan perilaku, faktor pendukung, faktor penghambat, dan keberlanjutan program. Proses kategorisasi dilakukan dengan membandingkan informasi antarinforman dan antarsumber data untuk menemukan pola, kesamaan, maupun perbedaan informasi.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pelaksanaan program, tingkat partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Setelah pola dan hubungan antartema teridentifikasi, dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan secara bertahap.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari para informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, proses verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali kesesuaian antara data lapangan, hasil kategorisasi, dan interpretasi analisis yang dilakukan. Dengan tahapan tersebut, analisis diharapkan menghasilkan temuan yang sesuai secara metodologis, dan mampu memberikan kajian komprehensif mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Ekonomi Sirkuler

Program Peduli Lingkungan Tanadoang (PELITA) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, dan penerapan prinsip ekonomi sirkuler. Implementasi program didasarkan pada hasil *social mapping* yang mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, perilaku pengelolaan sampah, potensi lokal, serta kesiapan kelembagaan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi

program tidak semata-mata diarahkan pada penyediaan sarana pengelolaan sampah, tetapi dirancang untuk menjawab permasalahan dan kapasitas lokal yang telah teridentifikasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama sebelum program tidak hanya berupa keberadaan sampah di lingkungan, tetapi juga belum terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang mampu menghubungkan proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali material. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sampah rumah tangga masih berakhir melalui pembakaran, pembuangan terbuka, atau masuk ke sistem pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir. Berdasarkan kondisi tersebut, program PELITA mengembangkan intervensi yang menggabungkan penyediaan fasilitas dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Strategi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah diposisikan sebagai persoalan sistem, bukan sekadar persoalan perilaku individu.

Temuan tersebut turut memperkuat pandangan Margayaningsih (2024) mengenai pentingnya pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak secara otomatis muncul hanya karena masyarakat dilibatkan dalam kegiatan. Partisipasi berkembang ketika masyarakat memperoleh sarana, pengetahuan, serta ruang untuk menjalankan peran secara nyata. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan *needs assessment* berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan lokal dan bentuk intervensi program. Hal ini menjelaskan mengapa fasilitas dan kegiatan pendampingan yang diberikan relatif dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat.

Pada tahap implementasi, perusahaan menyediakan sejumlah sarana pengelolaan sampah, antara lain area pemilahan, drum komposter, *compost bag*, serta fasilitas budidaya maggot (larva *Black Soldier Fly*). Penyediaan fasilitas tersebut menjadi titik awal perubahan praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Hasil observasi

menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah melakukan pemilahan ketika tersedia fasilitas yang dekat, sederhana, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, infrastruktur dalam konteks program ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga menjadi instrumen pembentuk perilaku.

Ketersediaan infrastruktur fisik ini terbukti secara empiris menjadi faktor yang berperan dalam mendorong keterlibatan awal masyarakat. Keberadaan fasilitas ini secara efektif mengurangi hambatan teknis dan logistik yang selama ini menjadi alasan masyarakat untuk tidak melakukan pemilahan sampah. Dengan tersedianya sarana yang dekat dan mudah diakses, masyarakat merasa lebih termotivasi untuk memulai praktik pengelolaan sampah karena mereka melihat adanya dukungan konkret yang memudahkan aktivitas mereka. Hal ini relevan dengan penelitian Zebua et al., (2025) yang mengungkapkan bahwa perlunya infrastruktur sebagai sarana pembelajaran sosial masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

“...kami terbantu dengan adanya fasilitas pengolahan sampah organik berbentuk drum komposter ini sehingga masyarakat bisa mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk...” (Warga Lorong Bonsai, Kelurahan Benteng Utara, 20 Desember 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas dipersepsikan bukan hanya sebagai bantuan material, tetapi sebagai sarana yang memungkinkan masyarakat melakukan praktik pengelolaan sampah secara langsung. Temuan serupa terlihat pada pengelolaan maggot di tingkat komunitas.

“...kami sangat terbantu dengan adanya kolam pembiakan maggot, karena sudah biasa panen kompos hasil penguraian maggot tiap minggu, estimasi 50 kg bahan organik untuk pakan maggot bisa dapat 17 sampai 20 kg kompos tiap minggu” (Pengelola TPS_{3R}, 18 Desember 2025)

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa proses pengolahan mulai menghasilkan keluaran yang dapat

dimanfaatkan secara rutin. Dalam perspektif ekonomi sirkuler, kondisi ini penting karena material yang sebelumnya diposisikan sebagai residu mulai dikembalikan ke dalam siklus pemanfaatan. Fasilitas vital yang disediakan oleh perusahaan meliputi area pemilahan sampah terpadu, unit komposter skala rumah tangga dan komunal, kandang budidaya maggot (*Black Soldier Fly*) sebagai serangga yang mulai diakui sebagai agen biokonversi yang efektif dalam pengelolaan limbah berkelanjutan dan selaras dengan ekonomi sirkular (Guo et al., 2021). Metode pengelolaan sampah dengan sarana drum komposter sederhana digunakan untuk mengolah sampah organik karena mudah diterapkan, biaya rendah, dan mampu mengurangi volume sampah melalui proses penguraian alami. Sementara itu, Maggot (*Black Soldier Fly Larvae*) digunakan untuk mengolah sampah organik karena mampu mengurai sisa makanan dengan cepat (Guo et al., 2021). Budidaya maggot tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menghasilkan biomassa berprotein tinggi sebagai pakan ternak serta residu yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sehingga mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan prinsip ekonomi sirkular (Eskandari et al., 2026).

Selain intervensi fisik, program CSR ini juga memberikan penekanan pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan teknis yang intensif. Pelaksanaan pelatihan yang diberikan dirancang secara holistik, mencakup teknik pemilahan sampah yang benar dari sumber, metode pengolahan sampah organik menjadi kompos berkualitas, teknik budidaya maggot BSF, hingga strategi pemanfaatan produk. Pendekatan edukatif ini bertujuan untuk memperkuat aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan) masyarakat agar mampu mengelola sampah secara mandiri dan profesional. Proses pelatihan dan pemberdayaan ini berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jiang et al., 2024).

” ...dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh PLN terkait pengelolaan

sampah serta bantuan ini (drum komposter dan *compost bag*), saya jadi mengetahui bagaimana saya mengelola sampah organik di sekitar tempat saya...” (Warga Lorong Bonsai, Kelurahan Benteng Utara, 18 Desember 2025)

Dari sisi partisipasi, keterlibatan masyarakat menunjukkan perkembangan dari penerima manfaat menuju pelaksana kegiatan. Masyarakat terlibat dalam pemilahan, pengumpulan bahan organik, pengoperasian fasilitas, pemanfaatan hasil pengolahan, hingga pemeliharaan fasilitas. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik partisipasi fungsional hingga interaktif sebagaimana kerangka oleh Pretty (1995), yaitu masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif dari suatu intervensi pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor yang memiliki peran aktif dan strategis dalam keseluruhan siklus program. Namun, temuan penelitian memberikan nuansa penting terhadap kerangka tersebut. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam aktivitas program, tetapi juga oleh meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi tersebut secara mandiri.

Hal ini selaras dengan Fang et al., (2023) mengenai pentingnya pelibatan masyarakat sejak tahap awal untuk membangun *sense of belonging*. Dalam program PELITA, rasa memiliki tersebut terlihat dari kesediaan masyarakat menggunakan dan merawat fasilitas serta melanjutkan praktik pengelolaan sampah setelah kegiatan pendampingan berlangsung. Dengan demikian, kepemilikan sosial terhadap program tidak hanya dibentuk melalui proses konsultasi, tetapi juga melalui pengalaman masyarakat dalam memperoleh manfaat dan menjalankan fungsi program secara langsung.

Perubahan perilaku menjadi salah satu temuan penting penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian peserta mulai memisahkan sampah organik dan anorganik serta mengarahkan sampah organik ke fasilitas pengolahan. Sebagian hasil pengolahan juga telah digunakan untuk

kebutuhan berkebun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengelolaan sampah yang berorientasi pada pembuangan menuju pola yang berorientasi pada pemanfaatan kembali.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkuler pada tingkat komunitas tidak selalu harus dimulai dari sistem ekonomi yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, ekonomi sirkuler berkembang melalui praktik sederhana, yaitu pemilahan sampah, pengolahan bahan organik, dan penggunaan kembali hasil pengolahan. Dengan demikian, nilai ekonomi sirkuler terbentuk melalui perubahan hubungan masyarakat terhadap material yang sebelumnya dianggap sebagai sampah.

Pada tingkat kelembagaan, TPS3R Sahabat yang dikelola KSM “Paraikkatte” menjadi aktor penting dalam menjaga keberlangsungan proses tersebut. Unit ini berfungsi sebagai penghubung antara rumah tangga sebagai sumber material dengan proses pengolahan dan pemanfaatan hasil. Kompos digunakan untuk kebutuhan tanaman, sedangkan maggot dimanfaatkan sebagai sumber pakan alternatif dan residunya dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah. Pola tersebut menunjukkan mulai terbentuknya hubungan antara pengelolaan limbah dan kegiatan produksi masyarakat.

Integrasi tersebut semakin terlihat pada pemanfaatan pupuk organik cair, kompos padat, dan biomassa maggot untuk kebun gizi, tanaman obat keluarga, pertanian rumah tangga, serta kegiatan perikanan dan peternakan skala kecil. Temuan ini sejalan dengan Cattaneo et al., (2024) yang menyatakan bahwa integrasi sistemik antara pengelolaan limbah dan produksi pangan ini merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip ekonomi sirkular berbasis komunitas serta menunjukkan adanya peluang untuk membentuk siklus material yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan ekonomi sirkuler ini.

Secara kuantitatif, penerapan sistem tersebut menunjukkan kapasitas pengelolaan

sampah yang cukup konsisten. Data selama Januari–Mei menunjukkan bahwa jumlah sampah yang terkelola berkisar antara 940 hingga 1.080 kg per bulan.

Tabel 1. Jumlah *input* sampah terkelola di Kelurahan Benteng Utara

Bulan	Total <i>Input</i> Sampah Terkelola (kg/bln)
Januari	1080
Februari	1000
Maret	940
April	982
Mei	1057

Sumber: Hasil observasi dan olah data penulis (2026)

Rata-rata *input* yang dikelola selama lima bulan mencapai sekitar 1.012 kg per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa unit pengolahan telah memiliki fungsi operasional yang relatif stabil dalam mengalihkan sampah organik dari sistem pembuangan menuju proses pemanfaatan. Dari *input* tersebut, unit menghasilkan sekitar 64 kg kompos, 6,4 kg maggot, 3 kg kasgot, dan 13,4 liter pupuk organik cair per bulan.

Temuan kuantitatif tersebut memperkuat hasil observasi kualitatif bahwa program telah menghasilkan perubahan pada tingkat sistem. Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara proporsional. Volume sampah yang terkelola memang menunjukkan kontribusi terhadap pengurangan sampah yang masuk ke sistem pembuangan, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan pengurangan total timbulan sampah wilayah karena cakupan program masih terbatas pada rumah tangga dan komunitas peserta. Dengan demikian, dampak lingkungan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kontribusi pengurangan sampah pada skala komunitas.

Dari sisi ekonomi, manfaat yang dirasakan masyarakat diperkirakan berkisar Rp50.000–Rp200.000 per orang per bulan. Manfaat tersebut terutama berasal dari penghematan pembelian pupuk, pemanfaatan maggot sebagai pakan, serta substitusi sebagian kebutuhan sayuran melalui hasil kebun. Temuan ini

menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program pada tahap penelitian lebih banyak berbentuk *cost saving* dan pemanfaatan hasil produksi daripada pendapatan tunai. Kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sirkuler pada tahap awal tidak harus diukur hanya berdasarkan nilai penjualan, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem mengurangi biaya rumah tangga dan menciptakan nilai guna baru dari material sisa.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa PELITA telah membentuk embrio sistem ekonomi sirkuler berbasis komunitas. Alur material dimulai dari sampah rumah tangga, kemudian dipilah dan diolah melalui *komposting* atau biokonversi maggot, selanjutnya menghasilkan kompos, kasgot, pupuk organik cair, dan biomassa yang kembali digunakan untuk kegiatan pertanian, peternakan, maupun kebutuhan rumah tangga. Pola ini menunjukkan adanya pengurangan ketergantungan terhadap sistem pembuangan sekaligus menciptakan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi.

Dari perspektif lingkungan, hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Fiore et al., (2022) bahwa salah satu opsi strategi yang direkomendasikan adalah menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah organik yang terdesentralisasi dapat menjadi alternatif yang layak untuk mengatasi permasalahan sampah organik. Selain itu, model ini berpotensi mendukung peningkatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas. Masyarakat pada akhirnya memiliki rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengelola sampah yang dihasilkannya.



Gambar 1. Diagram alur pengelolaan sampah Program Peduli Lingkungan Tanadoang

Program CSR ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah daerah melalui pengurangan sampah organik sejak dari sumber. Pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga dan komunitas dapat mengurangi volume sampah yang diangkut dan ditimbun di TPA Kaburu, sekaligus menekan potensi pencemaran, bau, dan emisi metana akibat pembusukan sampah organik. Pendekatan berbasis masyarakat ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah secara desentralisasi dapat menjadi strategi pendukung yang efektif dalam pengurangan beban TPA. Integrasi pengelolaan sampah dengan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal juga memperkuat kontribusi program terhadap pembangunan berkelanjutan serta membuka peluang untuk diterapkan pada wilayah lain dengan karakteristik serupa.

B. Modal Sosial dan Keberlanjutan Program

Keberhasilan implementasi Program PELITA didukung oleh kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program. Kolaborasi tersebut memperjelas pembagian peran, memperkuat koordinasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa intervensi program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga meningkatkan efektivitas dan penerimaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Sinergi antarpemangku kepentingan juga memperkuat keberlanjutan program melalui dukungan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pola kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung pencapaian tujuan program, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial PT PLN Indonesia Power UBP Tello UP PLTD Selayar di wilayah operasionalnya. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan transparansi dalam

pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan secara lingkungan untuk memperkuat legitimasi perusahaan di tengah masyarakat (Camilleri & Carroll, 2024).

Program dilaksanakan melalui kerja sama antara perusahaan, KSM “Paraikkatte”, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, dan masyarakat Kelurahan Benteng Utara. Masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi, yaitu perusahaan menyediakan dukungan dan pendampingan, KSM “Paraikkatte” melaksanakan kegiatan di tingkat TPS3R, pemerintah melakukan pembinaan dan memastikan kesesuaian kebijakan, serta masyarakat terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program.

“Selama kegiatan berjalan, biasanya kami berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dari TPS3R dan PLN, masyarakat juga dilibatkan, jadi kami tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada kendala di lapangan, biasanya dibicarakan bersama supaya kegiatan tetap berjalan.” (Warga Lorong Angkajeng, 18 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dengan berbagai *stakeholder* memiliki tujuan untuk memperkuat koordinasi lintas pihak dan mendukung efektivitas pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Putnam (2000) dalam Santoso (2020), menjelaskan bahwa modal sosial terbentuk dari ikatan sosial yang kuat (*bonding social capital*), yang berfungsi memperkuat kohesi internal komunitas melalui rasa saling percaya, kesamaan nilai, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai karakteristik yang melekat dalam organisasi sosial, yang mencakup kepercayaan, jaringan sosial, serta seperangkat norma yang memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial berfungsi sebagai sumber daya kolektif yang mendorong kolaborasi dan kerja sama antarindividu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Program Peduli Lingkungan Tanadoang (PELITA), hasil temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya

dipengaruhi oleh dukungan sumber daya fisik dan finansial, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif yang terbentuk di antara aktor yang terlibat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengorganisasi diri, dan mempertahankan kegiatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Temuan menunjukkan bahwa norma sosial dalam Program PELITA berkembang melalui pelatihan, kerja bakti, musyawarah, dan pengelolaan fasilitas bersama. Norma tersebut terlihat dari meningkatnya kebiasaan memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Praktik saling mengingatkan dan mengawasi juga menunjukkan terbentuknya kontrol sosial yang membantu mempertahankan perilaku pengelolaan sampah meskipun intensitas pendampingan program mulai berkurang.

Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu unsur yang mendukung keberlangsungan kerja sama dalam program. Putnam (2000) dalam Santoso (2020) turut mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas akan berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama secara efektif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun melalui transparansi pengelolaan program, konsistensi pendampingan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan tersebut tidak hanya terbentuk antara masyarakat dan pengelola program, tetapi juga antaranggota masyarakat serta *local hero* yang terlibat dalam pelaksanaan PELITA. Sejalan dengan temuan Auer et al., (2020), aktor dengan tingkat modal sosial termasuk jaringan sosial dan saling percaya yang tinggi cenderung memiliki kapasitas aksi kolektif yang lebih kuat karena mampu menekan biaya, mengurangi potensi konflik, serta menjaga stabilitas kerja sama. Dalam pelaksanaan PELITA, kepercayaan tersebut terlihat dari adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang berjalan sesuai kesepakatan. Kepercayaan masyarakat juga semakin

menguat setelah mereka merasakan manfaat dan perubahan yang dihasilkan program. Hal ini juga selaras dengan pernyataan informan bahwa

“Awalnya memang tidak banyak langsung ikut karena masih melihat bagaimana program ini berjalan. Setelah kegiatan mulai terlihat dan masyarakat merasakan manfaatnya, mereka mulai percaya. Sekarang kalau ada kegiatan, sebagian masyarakat lebih mudah diajak karena sudah melihat hasilnya dan tahu manfaatnya untuk lingkungan.” (Anggota KSM “Paraikatte”, 20 Desember 2025)

Selain unsur kepercayaan, unsur modal sosial lainnya terlihat pada kohesivitas, altruisme, dan jaringan sosial. Kohesivitas tercermin dalam partisipasi dan gotong royong masyarakat selama kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan altruisme terlihat dari kesediaan masyarakat untuk membantu dan berkontribusi secara sukarela. Sementara itu, jaringan sosial yang terbentuk melalui pelatihan, diskusi, kerja bakti, dan pengelolaan fasilitas bersama mempermudah pertukaran informasi, koordinasi, serta mobilisasi sumber daya. Temuan tersebut diperkuat oleh kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan PT PLN Indonesia Power UBP Tello UP PLTD Selayar yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program PELITA tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial yang meliputi kepercayaan, norma sosial, kohesivitas, altruisme, dan jaringan sosial. Kelima unsur tersebut memperkuat aksi kolektif, partisipasi masyarakat, dan kemampuan komunitas dalam mempertahankan praktik pengelolaan sampah. Dengan demikian, modal sosial menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan Program PELITA dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN Indonesia

Power UBP Tello UP PLTD Selayar di Kelurahan Benteng Utara menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh penyediaan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi, dan kekuatan modal sosial masyarakat. Perencanaan partisipatif, kepercayaan, kerja sama, dan jaringan sosial mendorong terbentuknya rasa memiliki serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program. Penerapan biokonversi maggot *Black Soldier Fly* (BSF) dan *komposting* juga memperkuat praktik ekonomi sirkular berbasis komunitas melalui pemanfaatan sampah organik menjadi sumber daya yang memiliki nilai guna dan ekonomi, sekaligus mendukung pengurangan timbunan sampah, ketahanan pangan, dan kepedulian lingkungan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa modal sosial berperan sebagai faktor penting yang menghubungkan intervensi CSR dengan keberhasilan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur dan teknologi akan lebih efektif apabila didukung oleh kepercayaan, norma kerja sama, jejaring sosial, dan partisipasi kolektif yang memungkinkan masyarakat mengadopsi serta mempertahankan praktik pengelolaan sampah. Secara praktis, keberlanjutan program memerlukan pergeseran dari pendekatan bantuan menuju pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian melalui penguatan kapasitas pengelola, kelembagaan lokal, pendampingan, *monitoring*, serta pengembangan nilai ekonomi hasil pengolahan sampah. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu dipertahankan agar manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi tetap berjalan setelah dukungan program berakhir.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi dengan karakteristik wilayah kepulauan, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi dan konteks masyarakat setempat serta belum dapat diterapkan secara umum pada wilayah dengan karakteristik yang

berbeda. Selain itu, keterbatasan data dan waktu penelitian menyebabkan pengukuran dampak program secara kuantitatif, terutama terkait pengurangan timbulan sampah, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang, belum dapat dilakukan secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup lokasi dan informan yang lebih beragam serta memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran dampak program yang lebih terukur. Dalam pelaksanaannya, penguatan modal sosial dan kapasitas kelembagaan masyarakat juga perlu menjadi bagian penting dalam setiap tahapan CSR, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anokye, K. (2025). Black Soldier Fly Larvae as a circular solution for organic waste management and sustainable livestock feed in Ghana. *Cleaner Waste Systems*, 12(March), 100416. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100416>
- Argentiero, A., Chiarini, B., & Marzano, E. (2023). Do social capital and the quality of institutions affect waste recycling? *Waste Management*, 155(September 2022), 240–251. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.11005>
- Auer, A., Below, J. Von, Nahuelhual, L., Mastrangelo, M., Gonzalez, A., & Gluch, M. (2020). The role of social capital and collective actions in natural capital conservation and management. *Environmental Science and Policy*, 107(March), 168–178. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.02.024>
- Awino, F. B., & Apitz, S. E. (2025). Solid waste management in the context of the waste hierarchy and circular economy frameworks: An international critical review. 20(1), 9–35. <https://doi.org/10.1002/ieam.4774>
- Behnert, A.-K., Antons, O., & Arlinghaus, J. (2024). Exploring the Challenges of Circular Economy Adoption: *IFAC PapersOnLine*, 58(19), 211–216. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.09.168>
- Bonan, J. (2025). Social norms and tariff salience: An experimental study on household waste management. *Journal of Environmental Economics and Management*, 130(October 2023), 103124. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2025.103124>
- Camilleri, M. A., & Carroll, A. B. (2024). Corporate Social Responsibility. In *International Encyclopedia of Business Management*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13701-3.00473-4>
- Cattaneo, A., Meneguz, M., Dabbou, S., Tambone, F., & Scaglia, B. (2024). Local circular economy : BSF insect rearing in the Italian Agri-Food Industry. *Waste Management*, 179(December 2023), 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.03.016>
- Eshete, A., Haddis, A., & Mengistie, E. (2024). Investigation of environmental and health impacts solid waste management problems and associated factors in Asella. *Heliyon*, 10(6), e28203. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28203>
- Eskandari, K., Kargar, Z., Sanei, M. E., & Hashamfirooz, M. (2026). The role of black soldier fly in food waste management and their environmental impacts: a systematic review. *Sustainable Futures*, 11(January), 101696. <https://doi.org/10.1016/j.sft.2026.101696>
- Fang, Y., Liu, F., Kim, S., & Pyo, M. (2023). *Consumer Participation in CSR: Spending Money versus Spending Time*.
- Fiore, G. Di, Specht, K., Jos, O., & Zanasi, C. (2022). Stakeholders' social acceptance of a new organic waste management policy in the city of Florian o. 379(October).

- <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134756>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy e A new sustainability paradigm ? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Guo, H., Jiang, C., Zhang, Z., Lu, W., & Wang, H. (2021). Material flow analysis and life cycle assessment of food waste bioconversion by black soldier fly larvae (*Hermetia illucens* L.). *Science of the Total Environment*, 750, 141656. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141656>
- Hombore, E. (2025). *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan di Merauke*. 1(2), 340–361.
- Isaacs, K., Shelley, A., & Boef, W. S. de. (2026). Collective action and seed production in Uttar Pradesh , India : A pathway for women ’ s empowerment and community seed security ☆. *Agricultural Systems*, 233(December 2025), 104595. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2025.104595>
- Jiang, Y., Zhu, L., Goulao, L. F., Li, X., Su, L., Chen, L., & Li, A. (2024). The bamboo weaving training as a strategy for women ’ s empowerment toward sustainability in rural revitalization : Practices , challenges and perspectives. *Women ’ s Studies International Forum*, 106(March). <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102975>
- Li, Q., Zhai, Q., & Wang, J. (2024). The impact of information intervention on urban residents ’ willingness to sort domestic waste. *Journal of Environmental Management*, 371(November), 123201. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123201>
- Margayaningsih, D. I. (2024). *Community Participation in Development Planning : Building Sustainable Communities*. 3(4), 1253–1262.
- Ninh, N. Van, & Tam, T. Van. (2026). The role of social capital in enhancing community participation for sustainable agricultural tourism. *Sustainable Futures*, 11(December 2025), 101612. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101612>
- Nurhadi dkk., M. (2023). *MENUJU PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN* (A. M. A. Nurhadi, Moh, Kristanto I. Putra (ed.)). Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) Jl.
- Omokaro, G. O., Michael, I., Efeni, S., Israel, O., & Obomejoro, J. (2026). Waste management in Nigeria : Systemic failures , circular economy pathways and sustainable solutions. *Environmental Development*, 57(September 2025), 101363. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101363>
- Pakravan, M. R. (2026). The impact of adopting circular agricultural economic practices on food security in rural regions. *Sustainable Futures*, 11(January), 101693. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2026.101693>
- Pretty, J. N. (1995). *Participatory Learning For Sustainable Agriculture*. 23(8), 1247–1263.
- Sabolak, Y., & Zebua, F. (2024). Analisis keberlanjutan dan peran csr dalam pengembangan ekonomi lokal. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 01, 20–26.
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV Saga Jawadwipa.
- Xu, Z., Xu, J., Li, S., & Wang, C. (2024). *The influencing factors of residents ’ willingness to pay in marine ecological restoration : The integration of the theory of planned behavior and social capital theory*. 161(January).
- Zebua, R. S. Y., Sunarti, Wahyudi, A., Hermawati, I., Wiryanto, W., Adnan, A., Suprpti, C., Takariani, D., & Saputra, A. (2025). Social learning , public participation and community engagement in waste management : A bibliometric analysis of trends and gaps.

Diklus : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1 (10), March 2026 – 67

Rizal Sultan Madani, A. Muhammad Agumpratama W, Mersi Irwan

Cleaner Waste Systems, 12(September),

100411.

<https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100>

411